

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU Nomor 12 Tahun 2011.
- _____. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 23 Tahun 2014.
- _____. *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*. UU Nomor 30 Tahun 2014.
- _____. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 9 Tahun 2015.
- _____. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. UU Nomor 15 Tahun 2019.
- _____. *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*. UU Nomor 11 Tahun 2020.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah*. PP Nomor 6 Tahun 2021.
- _____. *Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perizinan Berusaha*. Perda Nomor 8 Tahun 2022.

B. Buku

- Atmosudirdjo, Prayudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Bariun, La Ode. *Laporan Penelitian Masa Depan Otonomi Daerah Terhadap Keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja (Resentralisasi Ataupun Desentralisasi)*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan

Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2021.

H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

_____. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.

_____. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.

Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Harapan, 1993.

Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Kansil, C.S.T. dan S.T. Christine Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.

Nugraha, Safri, dkk. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.

Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2007.

Prasetyawan, Agus dan Gading Gamaputra. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Surabaya: Lakeisha, 2022.

- Prins, W.F. dan Kosim Adisapoetra. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1987.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa, 2009.
- Roestamy, Martin. *Demokrasi Pertanahan Dalam Negara Hukum Pancasila*. Bogor: Unida Press, 2023.
- Setiono. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, 2004.
- Sinamo, Nomensen. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
- Situmorang, Victor M. dan Cormentyna Sitanggang. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Syafei, Inu Kencana. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Tambunan, Michico, dkk. *Implementasi OSS RBA di Daerah Tantangan dan Kebutuhan Pemda*. Jakarta: Knowledge Sector Initiative, 2021.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Tim Penyusun. *Kota Bogor Dalam Angka 2023*. Bogor: BPS Kota Bogor, 2023.
- Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Bari van Hoeve, 1982.

Yudoyono, Bambang. *Otonomi Daerah: Desentralisasi dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

C. Lain-lain

Basyari, Iqbal. "Pelayanan Perizinan Berusaha dengan OSS di Daerah Terancam Terhambat".

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/08/05/pelayanan-perizinan-berusaha-dengan-oss-di-daerah-terancam-terhambat>. Diakses tanggal 15 Mei 2023.

DPMPTSP Kota Bogor. "Petunjuk Singkat *Online Single Submission (OSS)*". <https://oss.go.id/>. Diakses tanggal 5 Juni 2023.

Fakrulloh, Zudan Arif. "Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Pembangunan Substansi Hukum di Daerah". *Paper* disampaikan dalam acara Badan Pembinaan Hukum Nasional, 7 Juni 2011 di Palembang.

Falak, Agus Muhammad. Penata Perijinan Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor. *Wawancara* tanggal 19 September 2023.

Fitra, Safrezi. "Tawaran Kemudahan Berusaha dan Perizinan dalam UU Cipta Kerja". <https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/5f7cb392aecc8/tawaran-kemudahan-berusaha-dan-perizinan-dalam-uu-cipta-kerja>. Diakses tanggal 15 Mei 2023.

Heriani, Fitri Novia. "Sejumlah Rekomendasi dan Solusi atas Permasalahan OSS RBA". <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-rekomendasi-dan-solusi-atas-permasalahan-oss-rba-lt6152ffb79f434?page=all>. Diakses tanggal 5 Juni 2023.

Khairi, Ilman dan Abraham Yazdi Martin. "Pengembangan Model Asas *Droit De Preference* Terhadap Kepemilikan Tempat Usaha Pada Pasar Tanah Abang Jakarta". *Jurnal Ilmiah Living Law*, ISSN 2087-4936, Volume, 9 Nomor 2, Oktober 2017.

Ngadino, Agus. "Perizinan Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis". *Makalah*, tersedia di: <http://eprints.unsri.ac.id>. Diakses tanggal 20 Maret 2023.

Nikodemus, Thomas Martoredjo. "Indonesia Sebagai Negara Hukum". Tersedia di: <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum>. Diakses tanggal 15 April 2023.

Rahayu, Fuji Puspita, Enos Paselle, Thalita Rifda Khaerani. "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusahaonline Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda". *Journal Administrasi Publik*, 2021, 9 (2).

Redaksi. "Data Pejabat DPMPTSP Kota Bogor". https://perizinan.kotabogor.go.id/portal_22/index.php/portal/page/t/3. Diakses tanggal 5 Juni 2023..

Redaksi. "Tugas Pokok dan Fungsi". <https://perizinan.kotabogor.go.id>. Diakses Tanggal 5 Juni 2023.

Ruwaidah. "Presiden Resmikan Sistem Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis Risiko". <https://kemenag.go.id/nasional/presiden-resmikan-sistem-pelayanan-perizinan-usaha-berbasis-risiko-8niwpxp>. Diakses tanggal 5 Juni 2023.

Setiadi, Teguh, Edi Rohaedi, dan Muchamad Wajihuddin. "Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission". *PALAR (Pakuan Law Review)*, Volume 07, Nomor 01, Januari-Juni 2020.

Wijayanto, Danang. Martin Roestamy, dan Endeh Suhartini. "Asas Keadilan Dalam Suplai Makan Tahanan Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009". *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol. 12, No. 1, Januari 2020.

Yasyari, Andi Muhammad Faizal. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintah Kota Dalam Pemberian Izin Perhotelan di Kota Makassar". *Skripsi*. Makasar: Universitas Hasanuddin, 2012), hal. 31-33, <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/7909>.